

Optimalisasi Smart Asn Dalam Mendukung Transformasi Birokrasi Di Era Digital Di Provinsi Sulawesi Utara

Authors:

Ryan Aji Johannes

e-Mail:

ra.johannes@gmail.com

Affiliation:

Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

Received : Oktober, 06, 2024
Revised : November, 07, 2023
Accepted : Desember 24 ,2022
Available Online: Desember 31, 2024

Corresponding author

Ryan Aji Johannes
Universitas Sam Ratulangi, Indonesia
ra.johannes@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan ASN dalam menghadapi era transformasi digital, yang meliputi penguasaan teknologi serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan dalam organisasi dan budaya kerja yang semakin kolaboratif. Salah satu aspek menarik yang diangkat adalah perbedaan tingkat kesiapan antara ASN generasi milenial dan ASN senior, topik yang masih jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Kajian lebih dalam tentang kesenjangan literasi teknologi antara generasi ASN dan pengaruhnya terhadap implementasi konsep Smart ASN diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk mendukung pengembangan kebijakan ASN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pemilihan informan melalui teknik purposive sampling. Informan dipilih berdasarkan relevansi mereka terhadap topik penelitian, termasuk ASN milenial (di bawah 40 tahun), ASN senior (di atas 40 tahun), pejabat eselon yang memimpin unit kerja, tim IT atau transformasi digital, serta akademisi dan praktisi di bidang kebijakan publik dan transformasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Smart ASN di Provinsi Sulawesi Utara menjadi langkah strategis dalam memperkuat transformasi birokrasi digital yang sedang digalakkan pemerintah pusat. Sebagai bagian dari upaya menciptakan birokrasi yang lebih modern dan efisien, Smart ASN berperan signifikan dalam mendukung pelaksanaan e-Government, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat proses administrasi di berbagai sektor pemerintahan. Temuan utama dari penelitian ini adalah pendekatan integratif untuk menjembatani kesenjangan literasi teknologi antar generasi ASN melalui program mentoring kolaboratif antara ASN milenial dan senior di Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Aparatur cerdas, Birokrasi, Transformasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the readiness of ASN in facing the era of digital transformation, which includes mastery of technology and the ability to adapt to changes in the organization and an increasingly collaborative work culture. One interesting aspect raised is the difference in the level of readiness between millennial generation ASN and senior ASN, a topic that has rarely been discussed in previous studies. A deeper study of the gap in technological literacy between ASN

generations and its influence on the implementation of the Smart ASN concept is expected to provide new insights to support the development of ASN policies. This study uses a qualitative descriptive method with informant selection through purposive sampling techniques. Informants were selected based on their relevance to the research topic, including millennial ASN (under 40 years old), senior ASN (over 40 years old), echelon officials who lead work units, IT or digital transformation teams, as well as academics and practitioners in the field of public policy and digital transformation. The results of the study indicate that the development of Smart ASN in North Sulawesi Province is a strategic step in strengthening the digital bureaucratic transformation that is being promoted by the central government. As part of the effort to create a more modern and efficient bureaucracy, Smart ASN plays a significant role in supporting the implementation of e-Government, improving the quality of public services, and accelerating administrative processes in various government sectors. The main finding of this study is an integrative approach to bridging the gap in technological literacy between generations of ASN through a collaborative mentoring program between millennial and senior ASN in North Sulawesi Province.

Keywords: State Civil Apparatus, Smart Apparatus, Bureaucracy, Transformation

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan signifikan pada administrasi dan layanan publik, mendorong transformasi menuju model yang lebih efisien, mudah diakses, dan berbasis teknologi (Luki Natika, 2024). Transformasi ini melibatkan digitalisasi layanan, peningkatan partisipasi publik, dan penerapan teknologi inovatif (P. Utami, 2023). Inisiatif e-Government telah muncul sebagai strategi utama untuk meningkatkan efisiensi administrasi, meningkatkan partisipasi publik, dan mendorong inovasi dalam layanan publik (Taufiqurokhman et al., 2023). Proses digitalisasi melibatkan konversi data fisik ke dalam format digital, memanfaatkan platform daring, dan memperkuat sistem e-government untuk memfasilitasi akses publik terhadap informasi dan layanan (Irfan Basyo & Anirwan Anirwan, 2023). Meskipun transformasi ini menawarkan banyak manfaat, transformasi ini juga menghadirkan tantangan seperti kesenjangan digital, masalah keamanan data, dan perlunya perubahan budaya dan pengembangan sumber daya manusia (Luki Natika, 2024).

Pelayanan publik menjadi sesuatu yang sangat diperlukan agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak lagi cukup bagi pemerintah untuk hanya memberikan pelayanan dengan cara-cara konvensional; harus ada upaya nyata untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien melalui teknologi digital. Menurut Nasution, Nasution, dan Alpi (2019), transformasi birokrasi dari sistem manual ke digital merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, proses ini tidak dapat dilakukan dengan mudah. Diperlukan komitmen kuat dari pimpinan organisasi

dan adanya dukungan organisasi yang struktural melalui penyusunan tugas dan tanggung jawab yang jelas (Hasan, 2019).

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai ujung tombak pelayanan publik juga menghadapi tuntutan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Penyelenggaraan ASN yang berlandaskan pada asas profesionalisme, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi akan sangat menentukan apakah ASN mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam era digital ini. ASN harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang teknologi informasi agar mampu mengoptimalkan proses digitalisasi birokrasi. Dengan kata lain, keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia di dalam pemerintahan untuk mengelola dan memanfaatkan teknologi tersebut.

Pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan di Indonesia memunculkan konsep Smart ASN, yang menjadi salah satu target utama dalam Grand Design Pengembangan ASN 2020-2024. Smart ASN merupakan inisiatif untuk membentuk ASN yang tidak hanya profesional, tetapi juga cerdas dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Konsep ini sejalan dengan pendekatan Strategic Human Resource Management (SHRM), yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia yang strategis dan terintegrasi dengan tujuan organisasi. Armstrong (2009) menyatakan bahwa SHRM adalah pendekatan dalam mengelola sumber daya manusia yang berfokus pada pencapaian tujuan organisasi melalui strategi yang relevan dengan kebijakan dan praktik SDM yang terintegrasi.

Grand Design Pengembangan ASN 2020-2024, pemerintah memiliki strategi yang komprehensif dalam mengelola ASN, termasuk dalam hal perencanaan pegawai, pengadaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, peningkatan kesejahteraan, dan pensiun. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif di sektor pelayanan publik dan pemerintahan. Pengelolaan ASN yang efektif sangat penting untuk mendukung agenda reformasi birokrasi di Indonesia, di mana ASN berperan sebagai aktor kunci dalam mensukseskan reformasi ini.

Pengembangan Smart ASN juga memerlukan pendekatan yang berfokus pada peningkatan kompetensi, terutama dalam hal literasi teknologi (e-literacy) dan pemahaman terhadap kebijakan publik. Apandi (2020) berpendapat bahwa dalam menghadapi era digital, ASN perlu diberi bekal kompetensi yang lebih progresif agar mampu menjalankan tugasnya dengan efektif. Hal ini termasuk kemampuan dalam menggunakan sistem informasi manajemen, basis data (database), serta memahami

konsep e-government dan teknologi lainnya yang mendukung proses transformasi birokrasi.

Profil Smart ASN yang dirumuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tahun 2018 mencakup tujuh karakteristik utama, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta bahasa asing, keramahan, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan membangun jejaring kerja. Karakteristik ini tidak hanya menggambarkan ASN yang siap menghadapi tantangan di era digital, tetapi juga mencerminkan kebutuhan untuk membangun aparatur yang memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dan integritas profesional.

Transformasi digital dalam birokrasi dan pengembangan Smart ASN menjadi agenda strategis yang tidak hanya relevan tetapi juga krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan signifikan dalam cara pemerintah mengelola birokrasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Di balik transformasi ini, terdapat tantangan yang kompleks, termasuk kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur yang memadai, serta dukungan penuh dari para pemangku kepentingan. Keberhasilan agenda ini tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada perubahan mendasar dalam cara organisasi pemerintahan bekerja dan beradaptasi dengan dinamika modern.

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), konsep Smart ASN merupakan wujud dari Grand Design Pengembangan ASN 2020-2024 yang bertujuan menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman (KemenPAN-RB, 2018). ASN yang tergabung dalam Smart ASN harus mampu tidak hanya menguasai teknologi digital, tetapi juga memiliki kemampuan berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan kata lain, ASN tidak lagi bisa hanya mengandalkan cara-cara lama dalam memberikan pelayanan; mereka harus mampu mengoptimalkan teknologi untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, tepat, dan akurat.

Namun, proses ini tidak tanpa hambatan. Salah satu tantangan terbesar adalah kesiapan sumber daya manusia. Tidak semua ASN memiliki tingkat literasi teknologi yang memadai untuk dapat beradaptasi dengan sistem digital baru yang diperkenalkan. Dalam laporan World Economic Forum (2020), Indonesia menghadapi tantangan dalam kesiapan digital di kalangan tenaga kerjanya, termasuk di sektor pemerintahan. Banyak ASN, terutama yang lebih senior, merasa kesulitan beradaptasi dengan

teknologi baru. Padahal, teknologi tidak hanya membutuhkan pemahaman dasar, tetapi juga keahlian khusus agar bisa dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai landasan untuk reformasi birokrasi yang lebih luas, Smart ASN menuntut pemerintah untuk berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan ini tidak hanya terbatas pada pelatihan teknologi, tetapi juga mencakup penguatan soft skills yang penting untuk mendukung reformasi birokrasi yang adaptif dan inovatif. Sebagai contoh, karakteristik Smart ASN yang dirumuskan oleh KemenPAN-RB mencakup integritas, nasionalisme, profesionalisme, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta bahasa asing, keramahan, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan membangun jejaring kerja. Karakteristik ini menunjukkan bahwa pengembangan ASN tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga aspek-aspek yang lebih luas yang diperlukan untuk mendorong inovasi dalam pelayanan publik (KemenPAN-RB, 2018).

Selain kesiapan SDM, faktor infrastruktur juga menjadi penentu keberhasilan transformasi digital birokrasi. Tanpa adanya infrastruktur teknologi yang memadai, seperti akses internet yang cepat dan perangkat keras yang sesuai, penerapan teknologi digital dalam birokrasi akan mengalami banyak hambatan. Di banyak daerah, terutama di luar Jawa, infrastruktur teknologi masih belum memadai untuk mendukung transformasi digital ini. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam akses internet di daerah-daerah terpencil, masih ada kesenjangan digital yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya memastikan bahwa transformasi digital dapat dijalankan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Komitmen dari pimpinan organisasi juga merupakan elemen kunci yang sering kali diabaikan. Tidak jarang kebijakan yang baik dan inovatif hanya berhenti sebagai slogan tanpa implementasi nyata. Smart ASN, peran pimpinan organisasi sangat krusial dalam memberikan arahan, motivasi, dan dukungan yang diperlukan agar transformasi ini bisa berjalan efektif. Menurut Apandi (2020), keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada sejauh mana pimpinan organisasi mendukung perubahan, baik dalam bentuk kebijakan maupun implementasi program-program yang mendorong peningkatan kompetensi ASN. Tanpa komitmen yang kuat dari pimpinan, upaya untuk mewujudkan Smart ASN hanya akan menjadi wacana.

Tidak hanya dari sisi pimpinan, komitmen dari ASN itu sendiri juga menjadi penting. ASN harus memiliki kesadaran bahwa transformasi digital bukanlah sesuatu yang dapat dihindari. Mereka harus berani keluar dari zona nyaman dan siap untuk terus belajar. Menurut laporan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), banyak ASN

yang merasa canggung atau tidak nyaman dengan teknologi baru. Kurangnya motivasi dan resistensi terhadap perubahan sering kali menjadi hambatan dalam proses transformasi ini. Oleh karena itu, menciptakan budaya kerja yang mendukung inovasi dan pembelajaran terus-menerus menjadi salah satu tantangan penting dalam pengembangan Smart ASN.

Keberhasilan transformasi digital dan pengembangan Smart ASN juga sangat bergantung pada kebijakan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Dalam Grand Design Pengembangan ASN 2020-2024, pemerintah menargetkan bahwa pengembangan ASN harus didasarkan pada prinsip-prinsip strategic human resource management (SHRM). SHRM mengedepankan pengelolaan sumber daya manusia yang strategis dengan tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan SDM yang holistik, mulai dari rekrutmen hingga pensiun (Armstrong, 2009). Dengan pendekatan ini, ASN diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Pengembangan Smart ASN bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di era digital. Namun, untuk mencapai tujuan ini, semua pihak harus bersatu padu dalam memberikan dukungan penuh. Tanpa adanya kolaborasi yang kuat antara berbagai elemen pemerintah, upaya untuk mentransformasi birokrasi akan mengalami banyak kendala. Di sisi lain, apabila pemerintah berhasil mengelola dan mengembangkan SDM ASN dengan baik, maka transformasi digital ini dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan birokrasi modern di Indonesia.

Pemerintah juga harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Grand Design Pengembangan ASN. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi. Berdasarkan hasil evaluasi ini, pemerintah dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan agar pengembangan Smart ASN dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Penelitian ini bertujuan mengkaji kesiapan ASN secara spesifik dalam menghadapi transformasi digital yang tidak hanya dalam hal penguasaan teknologi tetapi juga dalam kemampuan beradaptasi dengan perubahan organisasi dan budaya kerja yang lebih kolaboratif dan berbasis teknologi. Fokus pada perbedaan kesiapan antara ASN generasi milenial dan ASN senior juga bisa menjadi kajian menarik yang belum banyak diangkat dalam penelitian terdahulu. Penelitian yang mendalam mengenai gap literasi teknologi antar generasi ASN serta dampaknya pada

implementasi Smart ASN dapat memberikan perspektif baru terhadap kebijakan pengembangan ASN.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif Kualitatif, metode pengumpulan data dengan meninjau dan menganalisis hasil observasi secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan peneliti sebagai instrumen utamanya (Zed, 2014). Pendekatan ini berfokus pada eksplorasi persepsi, motivasi, perilaku, serta tindakan subjek penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi (Creswell & Creswell, 2018).

Lokasi penelitian dipilih di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang merupakan salah satu wilayah yang mulai menginisiasi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama empat bulan, mencakup tahapan pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan hasil penelitian.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di mana mereka dipilih berdasarkan kapasitas untuk memberikan informasi yang relevan terhadap topik penelitian. Informan meliputi:

1. ASN Milenial (usia di bawah 40 tahun)
2. ASN Senior (usia di atas 40 tahun)
3. Pejabat eselon yang memimpin unit kerja di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Tim IT atau Transformasi Digital yang bertanggung jawab dalam pengembangan teknologi di pemerintahan daerah
5. Akademisi dan Praktisi dalam bidang kebijakan publik dan transformasi digital

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Data yang dikumpulkan berfokus pada kedalaman dan detail untuk mendukung analisis yang komprehensif (Moleong, 2012). Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui penerapan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Teknik member checking juga diterapkan dengan meminta informan memverifikasi temuan sementara, guna memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan maksud informan. Pendekatan ini dirancang untuk menghasilkan temuan yang akurat, mendalam, dan relevan, yang dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik transformasi digital di sektor pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi birokrasi di era digital bukan lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan yang harus diimplementasikan oleh setiap instansi pemerintahan di

Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menuntut perubahan dalam cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi dalam proses administrasi. Provinsi Sulawesi Utara, yang terletak di wilayah timur Indonesia, memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah melalui optimalisasi konsep Smart ASN (Aparatur Sipil Negara) di tingkat provinsi.

Smart ASN pada dasarnya bukan hanya berkaitan dengan kemampuan aparatur sipil negara dalam mengoperasikan teknologi. Ini adalah transformasi yang lebih luas yang mencakup penguasaan keterampilan kolaboratif, kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, dan dorongan untuk berinovasi dalam rangka mendukung transformasi birokrasi di era digital. Pentingnya Smart ASN terletak pada upaya untuk menciptakan ASN yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan lingkungan kerja yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Di Provinsi Sulawesi Utara, penerapan Smart ASN menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa birokrasi dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Penelitian ini menekankan kesiapan ASN di berbagai generasi dalam menghadapi perubahan teknologi. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana ASN yang berasal dari generasi milenial dibandingkan dengan ASN senior dalam hal penguasaan teknologi dan kesiapan menghadapi transformasi digital. Data dari Biro Humas dan Protokol Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa ASN generasi muda lebih cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dibandingkan ASN yang lebih senior. Sebagian besar ASN muda memiliki literasi digital yang lebih tinggi dan mampu mengoperasikan perangkat serta aplikasi teknologi dengan lebih baik. Sebaliknya, ASN senior sering kali mengalami hambatan dalam memanfaatkan teknologi digital dalam pekerjaan mereka, baik karena kurangnya pelatihan maupun karena resistensi terhadap perubahan.

Kesenjangan literasi teknologi di antara ASN generasi milenial dan ASN senior di Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu isu yang perlu segera diatasi. Kesenjangan ini dapat berdampak pada efektivitas kebijakan transformasi digital yang diterapkan oleh pemerintah. ASN yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan yang cukup tentang teknologi akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas yang semakin bergantung pada penggunaan perangkat digital dan platform online. Dampaknya, pelayanan publik yang seharusnya lebih cepat, efisien, dan

transparan bisa terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia yang belum siap menghadapi perubahan.

Smart ASN bertujuan untuk menciptakan aparatur yang tidak hanya mahir dalam menggunakan teknologi, tetapi juga mampu berkolaborasi lintas sektor, berinovasi dalam penyelesaian masalah, serta berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. Kebijakan ini sangat relevan mengingat daerah Provinsi Sulawesi Utara, memiliki potensi besar dalam memanfaatkan teknologi untuk memajukan birokrasi dan pelayanan publik. Selain itu, implementasi Smart ASN juga sejalan dengan tujuan pemerintah pusat dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis digital di seluruh Indonesia.

Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Sulawesi Utara menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di provinsi ini terus meningkat setiap tahunnya. Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi telah meluas, bahkan hingga ke daerah-daerah pedesaan. Hal ini menciptakan peluang besar bagi pemerintah provinsi untuk mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik. Namun, meskipun infrastruktur teknologi semakin berkembang, kesiapan ASN dalam memanfaatkan teknologi ini masih menjadi tantangan besar, terutama di kalangan ASN yang lebih senior.

Perbedaan kemampuan adaptasi terhadap teknologi di antara ASN generasi milenial dan ASN senior juga terlihat dalam cara mereka memanfaatkan aplikasi dan platform digital yang telah diterapkan di lingkungan pemerintahan. Berdasarkan data dari Biro Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, mayoritas ASN milenial sudah aktif menggunakan aplikasi e-Government yang diimplementasikan oleh pemerintah. Mereka mampu memanfaatkan teknologi ini untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Di sisi lain, ASN senior masih cenderung menggunakan metode konvensional dan lebih lambat dalam beradaptasi dengan sistem berbasis teknologi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah yang mendukung implementasi transformasi digital di lingkungan birokrasi. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang berfokus pada peningkatan kompetensi ASN, termasuk dalam hal penguasaan teknologi digital. Peraturan ini mengamanatkan adanya pelatihan-pelatihan berbasis teknologi bagi ASN di semua level, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih inovatif dan kolaboratif.

Namun, meskipun peraturan ini sudah diterapkan, hasil di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua ASN mendapatkan pelatihan yang memadai. Data

dari media massa lokal mengungkapkan bahwa hanya sekitar 60% ASN yang mengikuti pelatihan literasi digital yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Sebagian besar ASN yang mengikuti pelatihan ini adalah ASN generasi muda, sementara ASN senior masih kurang terlibat dalam program pengembangan kompetensi teknologi.

Selain itu, gap antara generasi milenial dan senior juga memengaruhi dinamika kerja di dalam birokrasi. ASN milenial cenderung lebih terbuka terhadap kolaborasi lintas departemen dan pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan tugas. Mereka juga lebih aktif dalam mencari solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan kerja. Sebaliknya, ASN senior lebih mengandalkan metode kerja tradisional yang mungkin tidak lagi relevan dalam era digital.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan penerapan Smart ASN. Salah satu langkah penting adalah memperluas akses terhadap pelatihan teknologi bagi ASN senior, serta menciptakan program mentoring di mana ASN milenial dapat membantu rekan kerja mereka yang lebih senior dalam memahami teknologi. Selain itu, perlu adanya upaya yang lebih serius untuk membangun budaya kerja yang lebih kolaboratif dan inovatif, dengan memberikan insentif kepada ASN yang berhasil menerapkan teknologi dalam pekerjaan mereka.

Optimalisasi Smart ASN juga harus didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai. Meskipun penetrasi internet di Sulawesi Utara telah meningkat, masih ada beberapa wilayah di provinsi ini yang belum memiliki akses internet yang stabil. Hal ini dapat menghambat implementasi kebijakan Smart ASN di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, pemerintah provinsi harus bekerja sama dengan pihak swasta dan pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan internet di seluruh wilayah Sulawesi Utara, sehingga seluruh ASN dapat memanfaatkan teknologi digital dalam pekerjaan mereka.

Optimalisasi Smart ASN Di Provinsi Sulawesi Utara

Optimalisasi Smart ASN di Provinsi Sulawesi Utara merupakan bagian penting dalam mendukung agenda besar transformasi birokrasi digital di Indonesia. Pemerintah pusat telah menggariskan arah kebijakan digitalisasi birokrasi melalui berbagai program dan regulasi, salah satunya dengan mempromosikan konsep Smart ASN. Namun, implementasi di lapangan, khususnya di daerah seperti Sulawesi Utara, masih menemui sejumlah tantangan yang signifikan, mulai dari kesiapan SDM hingga infrastruktur digital.

Berdasarkan laporan dari BKD Provinsi Sulawesi Utara, berbagai inisiatif untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam penggunaan teknologi digital telah

dilaksanakan. Program-program pelatihan, seperti pengenalan e-Government dan penggunaan sistem pelayanan publik berbasis digital, merupakan langkah awal yang sangat baik. Program ini sejalan dengan instruksi Kemenpan RB yang mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk menerapkan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Meski berbagai pelatihan telah diadakan, hasil yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai, khususnya di kalangan ASN senior. Tingkat partisipasi ASN senior dalam pelatihan literasi teknologi masih cukup rendah. Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Utara mencatat bahwa hanya sekitar 45% ASN senior yang mengikuti pelatihan digitalisasi, jauh di bawah partisipasi ASN milenial yang mencapai 85%. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan literasi teknologi antar generasi yang cukup tajam dan perlu mendapat perhatian serius dalam optimalisasi Smart ASN.

Perbedaan literasi teknologi ini berpotensi menghambat proses transformasi birokrasi di Sulawesi Utara. ASN milenial, yang cenderung lebih adaptif terhadap teknologi, dengan cepat mengintegrasikan inovasi digital ke dalam tugas-tugas administratif mereka. Sebaliknya, ASN senior menghadapi hambatan dalam mengadopsi teknologi baru, yang berimplikasi pada efektivitas penerapan Smart ASN di lapangan. Kesenjangan ini tidak hanya menjadi tantangan di sektor pelayanan publik, tetapi juga berpotensi memperlambat perwujudan tujuan nasional transformasi birokrasi digital.

Selain tantangan literasi teknologi, infrastruktur digital di Sulawesi Utara juga menjadi isu krusial yang perlu ditangani. Menurut laporan Diskominfo Sulawesi Utara, sekitar 28% wilayah di provinsi ini, terutama di daerah-daerah terpencil, masih mengalami keterbatasan akses internet. Keterbatasan ini jelas menghambat penerapan teknologi digital secara merata di seluruh sektor pemerintahan. ASN yang bertugas di wilayah-wilayah tersebut memiliki akses yang lebih terbatas terhadap program pelatihan dan teknologi pendukung, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif berbasis digital.

Meski demikian, potensi penerapan Smart ASN di Sulawesi Utara tetap menjanjikan. Laporan BPS Sulawesi Utara pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan 25% dalam jumlah layanan publik yang diakses secara online dibandingkan tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat Sulawesi Utara semakin terbiasa menggunakan layanan publik berbasis teknologi, seperti pengurusan e-KTP dan pembayaran pajak online. Namun, peningkatan ini belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih bergantung pada layanan konvensional karena keterbatasan akses teknologi.

Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu mengambil langkah strategis dalam mempercepat optimalisasi Smart ASN.

- 1) peningkatan infrastruktur digital di seluruh provinsi harus menjadi prioritas utama. Pengembangan jaringan internet di wilayah-wilayah terpencil, sebagaimana yang telah direncanakan oleh Diskominfo Sulawesi Utara, sangat krusial dalam memastikan akses teknologi yang merata. Tanpa akses internet yang memadai, upaya digitalisasi birokrasi akan sulit terealisasi dengan optimal.
- 2) peningkatan literasi digital ASN harus dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif. Pelatihan teknologi tidak hanya perlu ditingkatkan dalam hal kuantitas, tetapi juga kualitas. ASN senior memerlukan pendekatan pelatihan yang berbeda, mengingat mereka mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan teknologi dibandingkan generasi milenial. Pendekatan mentoring atau pendampingan dari ASN yang lebih muda dan melek teknologi bisa menjadi solusi yang efektif dalam mempercepat proses adopsi teknologi di kalangan ASN senior.
- 3) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif untuk mendukung ASN senior dalam proses transformasi digital. Menurut laporan Kemenpan RB, kebijakan transformasi digital di pemerintahan harus mempertimbangkan kondisi psikologis ASN senior yang mungkin merasa terancam oleh perubahan cepat dalam dunia kerja akibat digitalisasi. Program pendampingan khusus, seperti mentoring dari ASN milenial, dapat mengurangi resistensi terhadap teknologi dan membantu ASN senior lebih mudah beradaptasi.

Penerapan Smart ASN di Sulawesi Utara juga perlu didukung dengan regulasi yang kuat dan komitmen politik yang jelas. Peraturan Daerah terkait reformasi birokrasi digital, yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, menjadi salah satu landasan penting dalam mendorong percepatan implementasi Smart ASN. Namun, keberhasilan penerapan regulasi ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendanai program-program pengembangan kapasitas ASN, terutama dalam hal literasi teknologi.

Secara keseluruhan, optimalisasi Smart ASN di Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Namun, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai tantangan, mulai dari gap literasi teknologi antar generasi hingga keterbatasan infrastruktur digital di wilayah-wilayah terpencil. Dengan langkah-langkah yang tepat, seperti peningkatan akses internet, pelatihan literasi digital yang inklusif, dan kebijakan yang mendukung ASN senior, Provinsi Sulawesi

Utara dapat menjadi salah satu provinsi percontohan dalam penerapan birokrasi digital di Indonesia.

Pembahasan

Novelty utama yang dapat ditawarkan dari hasil penelitian ini adalah pendekatan integratif dalam mengatasi kesenjangan literasi teknologi antar generasi ASN melalui program mentoring kolaboratif antara ASN milenial dan senior di Provinsi Sulawesi Utara. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan literasi teknologi bagi ASN senior, tetapi juga menggabungkan unsur kolaborasi lintas generasi untuk mendorong adaptasi teknologi yang lebih cepat dan efektif.

Perlunya dikembangkan Pendekatan mentoring yang relevan dengan kondisi di Provinsi Sulawesi Utara, di mana data dari Biro Kepegawaian Daerah (2023) menunjukkan bahwa partisipasi ASN senior dalam pelatihan digitalisasi masih rendah, hanya 45%, dibandingkan dengan ASN milenial yang mencapai 85%. Resistensi ASN senior terhadap perubahan sering kali disebabkan oleh perasaan terancam akibat pergeseran teknologi yang cepat. Oleh karena itu, program mentoring antara ASN generasi milenial dan senior dapat menjadi langkah efektif untuk mempercepat adaptasi teknologi di kalangan ASN senior dan memastikan mereka tidak tertinggal dalam transformasi digital.

Menurut Heeks dan Bailur (2007), transformasi digital dalam birokrasi pemerintah bukan hanya tentang implementasi teknologi, tetapi juga mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Mereka menekankan Pentingnya *Capacity building* atau peningkatan kapasitas, yang melibatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan agar aparatur lebih siap menghadapi teknologi baru. Dalam hal ini, literasi teknologi tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga aspek perilaku dan budaya organisasi untuk memastikan keberlanjutan penggunaan teknologi dalam administrasi publik.

Selanjutnya, Lane dan Fink (2015) dalam studi mereka mengenai manajemen perubahan di organisasi publik menyoroti pentingnya mentoring antar generasi dalam mempercepat adopsi teknologi. Mereka berpendapat bahwa ASN senior yang sering kali menghadapi kesulitan dalam mengadaptasi teknologi baru dapat dibantu melalui pendekatan mentoring, di mana ASN milenial yang lebih mahir teknologi berperan sebagai mentor. Ini akan memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan yang lebih efektif dalam lingkungan kerja yang kolaboratif.

KESIMPULAN

Optimalisasi Smart ASN di Provinsi Sulawesi Utara menjadi langkah yang sangat strategis dalam mendukung transformasi birokrasi di era digital yang sedang gencar dicanangkan oleh pemerintah pusat. Sebagai bagian dari upaya besar untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan modern, Smart ASN memiliki peran penting dalam mendukung implementasi e-Government, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat proses administrasi di berbagai sektor pemerintahan. Potensi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui implementasi Smart ASN di Sulawesi Utara tetap sangat besar. Pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah adanya gap literasi teknologi antar generasi ASN. ASN generasi milenial umumnya lebih mudah beradaptasi dengan teknologi, karena mereka terbiasa dengan penggunaan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, ASN senior yang telah bekerja dalam birokrasi konvensional selama bertahun-tahun seringkali mengalami kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru. Mereka mungkin merasa terbebani oleh perubahan yang cepat dan sulit untuk mengikuti perkembangan teknologi yang dinamis.

Untuk mewujudkan optimalisasi Smart ASN yang lebih merata, pemerintah daerah perlu terus mendorong peningkatan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah provinsi. Program perluasan akses internet ke daerah-daerah terpencil harus diprioritaskan, karena akses teknologi yang baik merupakan fondasi penting bagi pelaksanaan Smart ASN yang efektif. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu konsisten dalam menyediakan program-program pelatihan literasi digital yang berkualitas bagi seluruh ASN, baik yang muda maupun yang senior. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, program pelatihan yang terarah, dan peningkatan infrastruktur digital, Sulawesi Utara memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengimplementasikan birokrasi digital yang modern, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah strategis dalam optimalisasi Smart ASN ini akan membawa Sulawesi Utara lebih dekat menuju transformasi birokrasi digital yang diharapkan oleh pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apandi, A. (2020). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 14(1), 27–36. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v14i1.608>
- Armstrong, M. (2009). *Buku Pegangan Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis*, Armstrong, Koganpage.

- Basyo, Irfan, & Anirwan, (2023), Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur, IJI Publication, Vol. 4 No. 1, <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i1.477>
- Biro Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. (2023). Laporan Penyelenggaraan Pelatihan ASN di Provinsi Sulawesi Utara.
- BPS Provinsi Sulawesi Utara. (2023). Laporan Tahunan 2023. Sulawesi Utara.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.
- Diskominfo Provinsi Sulawesi Utara. (2024). Rencana Pengembangan Infrastruktur Digital Sulawesi Utara 2024
- Hasan, E. (2019). Membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) Cerdas Menuju Birokrasi Berkelas Duniatahun 2024. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 12(1), 1–12.
- Heeks, R., & Bailur, S. (2007). Analyzing E-Government Research: Perspectives, Philosophies, Theories, Methods, And Practice, *Government Information Quarterly*, 24(2), 243-265.
- Kementerian PANRB. (2018). Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024. Sumber dari internet: [https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/5804-4-kementerian-panrb,30 oktober 2018](https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/5804-4-kementerian-panrb,30%20oktober%202018), diakses tgl 20 desember 2022
- Lane, J. E., & Fink, D. A. (2015). Public Sector Innovation And Change Management: Leadership In The Digital Age. Palgrave Macmillan.
- Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Ayah, Nasution, AP, & Alpi, MF (2019). Pengaruh Penerapan Smart ASN Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara di Era Disrupsi Teknologi Indonesia 4.0. Dalam Mesran (Ed.), Tantangan & Peluang di Bidang Pendidikan untuk Menghadapi Era Disrupsi pada Teknologi RI 4.0 (pp. 43–51).
- Natika Luki, 2024, Transformasi Pelayanan Publik Di Era Digital: Menuju Pelayanan Masa Depan Yang Lebih Baik, Volume 6 Issue 1, *The World of Public Administration Journal (WPAJ)*, <https://doi.org/10.37950/wpaj.v6i1.2040>
- Taufiqurokhman, T., Pathony, T., Damanik, F. H. S., Nurhakim, A., & Judijanto, L. (2024). Transformasi E-Government: Mengevaluasi Dampak Digitalisasi terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(2), 1796-1803. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.2390>
- Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 6(2), 1-9. <https://doi.org/10.54783/japp.v6i2.726>
- Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.